



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Keuangan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Putri Aprilia Bawode¹, Zubaidah Rahman², Nikma Bilondatu³ Ilyas Lamuda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Gorontalo

Email: putriapriabawode2304@gmail.com

Keywords:

Government Accounting Standards;
Sistem Informasi Keuangan Desa;
Village Financial Transparency;
Multiple Linear Regression

Abstract. *This study analyzes how Government Accounting Standards (SAP) and the Village Financial Information System (Sistem Informasi Keuangan Desa) affect transparency in village financial reports in Tibawa District. The study uses a 1-5 Likert-scale questionnaire to measure Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan Desa, and transparency. The questionnaire's validity and reliability were tested. The method was quantitative, using multiple linear regression. Data analysis used classical assumption tests, t-test (partial), F-test (simultaneous), and the coefficient of determination (R^2). Results show that Standar Akuntansi Pemerintahan and Sistem Informasi Keuangan Desa are positively related but do not significantly affect transparency (t-test: 0.849 and 0.383; F-test: 0.518). The R^2 value of 0.048 shows their effect is very small. Transparency is influenced more by other factors, such as apparatus competence, commitment, and community participation. This shows that Standar Akuntansi Pemerintahan and Sistem Informasi Keuangan Desa are not optimally implemented or utilized, so they fail to significantly improve transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Keuangan Desa (Sistem Informasi Keuangan Desa), baik secara parsial maupun simultan, terhadap transparansi laporan keuangan desa di Kecamatan Tibawa, yang diukur melalui kuesioner skala Likert 1–5 yang mengukur variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan Desa, dan transparansi, serta telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa memiliki hubungan positif, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi (uji t: 0,849 dan 0,383; uji F: 0,518). Nilai R^2 sebesar 0,048 menunjukkan pengaruh keduanya sangat kecil, sehingga transparansi lebih dipengaruhi faktor lain, seperti kompetensi aparatur, komitmen, dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa di lapangan belum optimal, sehingga belum mampu meningkatkan transparansi secara nyata.

Corresponden author:

Email: putriapriabawode2304@gmail.com

Pendahuluan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi bagaimana dana publik dikelola dan digunakan oleh pemerintah desa. Semakin terbuka informasi yang disampaikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lamuda dkk., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mendukung terciptanya transparansi pengelolaan keuangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perkembangan teknologi dan ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Saprudin & Rahman, 2020).

Salah satu instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah agar informasi yang dihasilkan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan (Afriyeni dkk., 2024). Penerapan SAP yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi oleh masyarakat maupun pemerintah daerah (Pramusty & Hasibuan, 2023).

Selain penerapan SAP, penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) juga menjadi instrumen penting dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa (M dkk., 2022). Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri untuk membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem ini memungkinkan data keuangan tercatat secara sistematis dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019).

Meskipun demikian, implementasi SAP dan pemanfaatan Siskeudes di berbagai desa masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap standar akuntansi, serta kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan penerapan kedua instrumen tersebut belum berjalan secara maksimal (Rachman dkk., 2023). Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat keterbukaan informasi keuangan desa dan menghambat terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan yang diharapkan masyarakat (Saputri & Farida, 2023).

Kecamatan Tibawa merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana desa, keterlambatan pelaporan keuangan, serta kurang optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Desa oleh aparatur desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan di tingkat desa (Nurhidayati dkk., 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Mahmud dan Lukum (2023) menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. Sementara itu, Doe dkk. (2025) menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa melalui Siskeudes belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala teknis dan administratif. Namun demikian, penelitian yang mengkaji pengaruh penerapan SAP dan Siskeudes secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya di Kecamatan Tibawa, masih sangat terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tibawa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada 10 desa di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga diperoleh sebanyak 30 responden.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian dilakukan dengan melihat hubungan antara skor masing-masing item dengan skor total variabel. Penentuan valid atau tidaknya suatu item dilakukan dengan membandingkan nilai *r*-hitung dengan *r*-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Item dinyatakan valid apabila nilai *r*-hitung lebih besar dari *r*-tabel dan bernilai positif. Oleh karena itu, uji validitas perlu diterapkan pada seluruh variabel agar instrumen penelitian yang digunakan layak untuk menguji hipotesis.

Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1).

Tabel 1 Uji Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1).

No	r- Hitung	r- Tabel	Karakteria
1	0,746	0,361	Valid
2	0,582	0,361	Valid
3	0,880	0,361	Valid
4	0,752	0,361	Valid
5	0,558	0,361	Valid

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai *r*-hitung yang melampaui nilai *r*-tabel sebesar 0,361. Nilai *r*-hitung yang diperoleh berada pada kisaran 0,558 hingga 0,943, sehingga seluruh item dapat dinyatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap butir pertanyaan mampu merepresentasikan variabel Standar Akuntansi Pemerintahan secara tepat.

Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Keuangan Desa (X2).

Tabel 2 Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Keuangan Desa (X2).

No	r- Hitung	r- Tabel	Karakteria
1	0,698	0,361	Valid
2	0,690	0,361	Valid
3	0,730	0,361	Valid
4	0,729	0,361	Valid
5	0,769	0,361	Valid

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Hasil uji validitas pada variabel Sistem Informasi Keuangan Desa (Sistem Informasi Keuangan Desa) menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r-hitung yang lebih tinggi dibandingkan r-tabel sebesar 0,361, dengan rentang nilai antara 0,690 hingga 0,769. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa/ (Y)

No	r- Hitung	r- Tabel	Karakteria
1	0,650	0,361	Valid
2	0,606	0,361	Valid
3	0,597	0,361	Valid
4	0,636	0,361	Valid
5	0,841	0,361	Valid

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada variabel transparansi pengelolaan keuangan desa, seluruh item pernyataan memiliki nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel sebesar 0,361, dengan nilai berkisar antara 0,597 hingga 0,841. Dengan demikian, semua item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem informasi keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tibawa. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha, di mana suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

Tabel 4 Uji Realibilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Alpha Cronbach	Standar reabilitas	Kriteria
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	0,756	0,60	Reliabel
2	Sistem Informasi Keuangan	0,771	0,60	Reliabel
3	Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa	0,668	0,60	Reliabel

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,756 untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, 0,771 untuk Sistem Informasi Keuangan Desa, dan 0,668 untuk transparansi. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimum 0,60, sehingga ketiga variabel dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah metode statistik untuk menentukan apakah distribusi data suatu variabel mengikuti distribusi normal, yang merupakan asumsi penting dalam analisis parametrik . Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang dimana jika nilai p-value > 0.05, maka data dianggap normal, tetapi jika p-value ≤ 0.05, maka data tidak normal (Natalio et al., 2025). Berikut tabel hasil uji normalitas.

Tabel 5 Uji Normalitas

Unstandardized Residual		
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,33657293
Most Extreme Differences	Absolute	,223
	Positive	,135
	Negative	-,223
Kolmogorov-Smirnov Z		,1221
Asymp. Sig. (2-tailed)		,101

Sumber : Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig.) sebesar 0,101 dengan jumlah sampel sebanyak 30. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas, karena jika variabel independen saling berkorelasi tinggi maka dapat mempengaruhi keakuratan dalam mengestimasi pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	9,984	3,648		2,737	,011		
X1	,039	,203	,042	,192	,849	,739	1,352
X2	,190	,214	,194	,887	,383	,739	1,352

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, diperoleh nilai Tolerance pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1) dan Sistem Informasi Keuangan Desa (Sikeudes) (X2) sebesar 0,739, yang menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk kedua variabel sebesar 1,352, yang masih berada di bawah batas maksimum yaitu 10. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada setiap observasi. Model regresi yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan atau disebut homoskedastisitas. Apabila terjadi heteroskedastisitas, maka hasil analisis regresi dapat menjadi kurang akurat.

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
(Constant)	-4,459E-16	3,648		,000	1,000		
X1	,000	,203	,000	,000	1,000	,739	1,352
X2	,000	,214	,000	,000	1,000	,739	1,352

Sumber: Olah Data Tahun 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Sistem Informasi Keuangan Desa (X2) masing-masing sebesar 1,000, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya. Autokorelasi umumnya terjadi pada data runtut waktu (time series), namun tetap perlu diuji untuk memastikan bahwa model regresi tidak melanggar asumsi independensi residual. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai Durbin-Watson, dimana nilai yang mendekati angka 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Jika nilai mendekati 0 menunjukkan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai mendekati 4 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Berikut hasil uji Autokorelasi.

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,023 ^a

Sumber: Olah Data 2026

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson, diperoleh nilai sebesar 1,023. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Ketiadaan autokorelasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Hal ini menandakan bahwa model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik, sehingga layak digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear, yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada bagian *linearity* dan *deviation from linearity*, dimana jika nilai signifikansi *deviation from linearity* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dan hubungan antar variabel bersifat linear. Berikut:

Tabel 9 Uji Linearitas X1
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y X1	Between Groups	(Combined)	183,267	10	18,327	2,236	,063
		Linearity	6,714	1	6,714	,819	,377
		Deviation from Linearity	176,552	9	19,617	2,394	,052
		Within Groups	155,700	19	8,195		
		Total	338,967	29			

Sumber: Olah Data 2026

Hasil uji linearitas antara variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (Y) menunjukkan nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,052, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear. Dengan terpenuhinya asumsi linearitas, maka model regresi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa perubahan pada variabel Standar Akuntansi Pemerintahan akan diikuti oleh perubahan pada transparansi secara linier.

Tabel 10 Uji Linearitas X2

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y X2	Between Groups	(Combined)	99,925	10	9,993	,794	,636
		Linearity	15,679	1	15,679	1,246	,278
		Deviation from Linearity	84,246	9	9,361	,744	,666
		Within Groups	239,042	19	12,581		
		Total	338,967	29			

Sumber: Olah Data 2026

Berdasarkan hasil uji linearitas antara variabel Sistem Informasi Keuangan Desa (X2) dan transparansi (Y), diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,666, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat linear.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dalam hubungan antara Sistem Informasi Keuangan Desa dan transparansi. Hal ini memperkuat bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi linearitas.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis tersebut digunakan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan sistem informasi keuangan (X2) terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa (Y). Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = variabel dependen

a = konstanta

b1 dan b2 = koefisien regresi,

X1 dan X2 = variabel independen,

e = error.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh persamaan regresi yaitu:

Tabel 11 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Sig.
		B		Beta	
1	(Constant)	9,984	3,648		,011
	X1	,039	,203	,042	,849
	X2	,190	,214	,194	,383

Sumber: Olah Data 2026

Nilai konstanta sebesar 9,984 menunjukkan bahwa jika variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sistem informasi keuangan tidak mengalami perubahan, maka nilai transparansi sebesar 9,984. Koefisien regresi X1 sebesar 0,039 menunjukkan adanya hubungan positif antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan transparansi, meskipun pengaruhnya kecil. Sementara itu, koefisien regresi X2 sebesar 0,190 menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan juga berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, kedua variabel independen memiliki arah hubungan positif terhadap variabel dependen, namun untuk mengetahui tingkat signifikansinya perlu dilihat melalui uji t dan uji F.

Uji Parsial (t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan sistem informasi keuangan (X2) terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa (Y) secara terpisah. Pengambilan keputusan pada uji t didasarkan pada nilai signifikansi (Sig). Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 12 Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	Sig.
		B		Beta	
1	(Constant)	9,984	3,648		,011
	X1	,039	,203	,042	,849
	X2	,190	,214	,194	,383

Sumber: Olah Data 2026

Berdasarkan hasil uji t, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,849 yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Demikian pula, variabel Sistem Informasi Keuangan Desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,383 yang juga lebih besar dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kedua variabel independen belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi variabel transparansi.

Uji Simultan (f)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan sistem informasi keuangan (X2) secara simultan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa (Y).

Pengambilan keputusan pada uji F didasarkan pada nilai signifikansi (Sig). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 13 Uji f

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16,118	2	8,059	,674	,518 ^a
	Residual	322,849	27	11,957		
	Total	338,967	29			

Sumber: Olah Data 2026

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,518 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan hubungan kedua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Hal ini mengindikasikan adanya variabel lain yang lebih berpengaruh dalam menjelaskan transparansi.

Uji Determinasi R²

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini, uji R² bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) dan sistem informasi keuangan (X2) dalam menjelaskan transparansi pengelolaan keuangan desa (Y).

Penentuan hasil uji ini didasarkan pada nilai R Square. Semakin tinggi nilai R Square, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R Square rendah, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen juga semakin kecil.

Tabel 5.17 Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,218 ^a	,048	-,023	3,458

Sumber: Olah Data 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar 0,048 atau 4,8%, yang menunjukkan bahwa variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa hanya mampu menjelaskan sebagian sangat kecil dari variasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Secara umum, semakin tinggi nilai R atau R Square, maka semakin kuat hubungan dan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Namun dalam penelitian ini, nilai R sebesar 0,218 menunjukkan hubungan yang lemah antara variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa dengan transparansi, sehingga kontribusi keduanya dalam model masih sangat terbatas. Selain itu, nilai Adjusted R Square yang bernilai negatif (-0,023) menegaskan bahwa model belum mampu memberikan penjelasan yang baik setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel. Dengan demikian, sebesar 95,2% variasi transparansi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pengawasan, komitmen aparatur desa, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan fenomena yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa saja, sehingga diperlukan penambahan

variabel lain agar model penelitian dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya jelaskan yang lebih tinggi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki hubungan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, namun secara statistik tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji parsial (uji t) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,849 lebih besar dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,039 menunjukkan bahwa peningkatan penerapan SAP cenderung diikuti dengan peningkatan transparansi, tetapi peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk memberikan perubahan yang nyata terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Secara teoritis, penerapan SAP seharusnya mampu meningkatkan transparansi karena SAP menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah agar informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dengan adanya standar tersebut, laporan keuangan desa diharapkan menjadi lebih sistematis sehingga memudahkan masyarakat maupun pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP di Kecamatan Tibawa belum sepenuhnya mampu meningkatkan transparansi secara signifikan.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena penerapan standar akuntansi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam memahami dan menerapkan standar tersebut. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman aparatur terhadap standar akuntansi, serta belum optimalnya pelaksanaan administrasi keuangan dapat menyebabkan SAP belum memberikan dampak langsung terhadap keterbukaan informasi keuangan desa. Permasalahan tersebut sejalan dengan kondisi bahwa implementasi SAP dan sistem informasi keuangan desa masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Mahmud dan Lukum (2023) yang menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh objek penelitian yang berbeda, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini melihat dampaknya terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) memiliki hubungan positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa, tetapi tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,383 lebih besar dari 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,190. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan Siskeudes memiliki kecenderungan meningkatkan transparansi, tetapi pengaruh tersebut belum cukup besar untuk menjelaskan perubahan transparansi secara nyata.

Secara konsep, penggunaan Siskeudes memiliki peran penting dalam mendukung transparansi karena sistem ini membantu pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara lebih terstruktur. Data keuangan yang tersimpan secara sistematis dan terintegrasi seharusnya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta memudahkan proses penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun, tidak signifikannya pengaruh Siskeudes menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi saja belum cukup untuk mewujudkan transparansi. Sistem yang baik tetap

membutuhkan dukungan dari pengguna sistem, terutama aparat desa yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi serta memahami pentingnya penyajian informasi keuangan kepada masyarakat. Apabila pemanfaatan sistem hanya terbatas pada kebutuhan administratif dan pelaporan internal, maka keberadaan Siskeudes belum mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik secara maksimal.

Temuan ini mendukung penelitian Doe dkk. (2025) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa melalui Siskeudes belum optimal karena masih terdapat kendala teknis dan administratif. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan komitmen organisasi dalam menggunakannya.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa Secara Simultan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan SAP dan Sistem Informasi Keuangan Desa secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat dari hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,518 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, kedua variabel independen tersebut belum mampu menjelaskan perubahan transparansi pengelolaan keuangan desa secara bersama-sama.

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,048 atau 4,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa SAP dan Siskeudes hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi transparansi pengelolaan keuangan desa, sedangkan sebesar 95,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Faktor tersebut antara lain kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, komitmen aparat desa, pemanfaatan teknologi secara optimal, serta partisipasi masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh penerapan regulasi maupun teknologi informasi. SAP dan Siskeudes memang menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana aparat desa menerapkan standar tersebut serta bagaimana informasi keuangan dikomunikasikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara teori SAP dan Siskeudes memiliki peran dalam meningkatkan transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di Kecamatan Tibawa belum optimal sehingga belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparat desa, penguatan pengawasan, serta peningkatan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tibawa, dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa menunjukkan hubungan yang bersifat positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan serta optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa cenderung diikuti oleh meningkatnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Keuangan Desa tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa. Hasil yang sama juga ditemukan pada pengujian secara simultan, dimana kedua variabel tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara bersama-sama. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel dalam

menjelaskan transparansi masih terbatas, sehingga terdapat faktor lain di luar model penelitian yang lebih dominan dalam mempengaruhi transparansi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, namun dalam praktiknya di lokasi penelitian belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa..

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa di Kecamatan Tibawa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui penguatan kompetensi aparatur desa dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi transparansi pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Afriyeni, P., Zuliyana, S., Asriani, S., & Syaherwandi. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelo Perusahaan*, 1(4), 474–485.
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02(1), 41–48.
- M, H. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan bGunungsari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 67–81.
- Natalio, D., Tanudjaja, C. Y. H., & Dharmasatya, F. K. (2025). Analisis Perbandingan Profitabilitas Bank BumN DAn Bank And Afret The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Of Social And Economics Research*, 7(1), 608–617.
- Nurhidayati, S., Syaifullah, S., & Muslim, M. (2025). Dampak Penggunaan Aplikasi Siskeudes Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Kapita SelektA Administrasi Publik*, 6(1), 453–457.
- Pramusty, M. A., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 150–164.
- Rachman, D., Sofwan, S. V., & Amelia, S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Survei Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Anjasari). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14(2), 134–150.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 92–100.
- Saprudin, & Rahman, Z. (2020). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. *Jurnal Universitas Bina Mandiri Gorontalo*, 1, 144–163.
- Saputri, H., & Farida, I. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Awolagading Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Mandalika*, 27(2), 58–66.